



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 629,084,333,400,00 mengalami penambahan sebesar Rp.65,203,028,052,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 694,287,361,452,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 621,966,178,000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>24,512,409,000,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 646,478,587,000,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 629,084,333,400,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>65,203,028,052,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 694,287,361,452,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp. (47,808,774,452,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 9,118,155,400,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>40,690,619,052,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 49,808,774,452,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 2,000,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2,000,000,000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 47,808,774,452,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 15,555,500,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 13,351,300,000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 28,906,800,000,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 574,758,182,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 574,758,182,000,00
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp. 31,652,496,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11,161,109,000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 42,813,605,000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 4,167,500,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan	Rp. 4,167,500,000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 9,058,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11,514,815,000,00</u>
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 20,572,815,000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp. 240,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 240,000,000,00
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 2,090,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1,836,485,000,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	

setelah perubahan Rp. 3,926,485,000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp. 28,202,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp. 28,202,000,000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 497,417,022,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 497,417,022,000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 49,139,160,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 49,139,160,000,00

(4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
1. Semula	Rp. 2,300,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 700,000,000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah perubahan	Rp. 3,000,000,000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp. 29,352,496,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 10,461.109.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 39,813,605,000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 299.909.687.551,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.620.005.052,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 311.529.692.603,00
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 329,174,645,849,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 53.583.023.000,00</u>
Jumlah belanja langsung	

setelah perubahan Rp. 382.757.668.849,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 279,130,123,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 10.000.680.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 289.130.803.000,00
b. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 4,965,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1,427,850,000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 6,392,850,000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 1,500,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 280,000,000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 1,780,000,000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	
1. Semula	Rp. 9,711,407,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa setelah perubahan	Rp. 9,711,407,000,00
e. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 4,603,157,551,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (88,524,948,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. <u>4,514,632,603,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 33,416,186,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1,369,387,000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 34,785,573,000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 144,900,117,648,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 25,747,666,400,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 170.647.784.048,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 150,858,342,201,00

2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 26.465.969.600,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 177.324.311.801,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp. 9,118,155,400,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 40,690,619,052,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 49,808,774,452,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp. 2,000,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2,000,000,000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp. 9,118,155,400,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 40,690,619,052,00
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 49,808,774,452,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp. 2,000,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp. 2,000,000,000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpadua Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 19 September 2014

Plh. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

HAMID MUHAMMAD

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 19 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN